BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN LAPORAN KKL

4.1 keluaran *(Output)* yang dapat menentukan keberhasilan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian

Tekonologi dan informasi merupakan realita yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari di era modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju merupakan peluang bagi setiap instansi pemerintahan dan lembaga pemerintahan untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam rangka meningkatkan pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan teknologi dan informasi dilembaga pemerintahan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga setiap masyarakat mudah mendapatkan informasi.

Sistem informasi merupakan sistem sosial yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sebagai sistem sosial, penerapan sistem informasi tidak dapat diberlakukan seperti mesin (*mindless system*) atau seperti makhluk hidup dengan satu otak (*uniminded system*). Perubahan yang cukup fundamental dalam pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian dapat diketahui dari Pemrosesan, penyajian, dan pemanfaatan data sebagai informasi dan pengetahuan. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berfungsi untuk mengolah data serta menampilkan data mengenai data pegawai yang ada di

Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat. Salah satu tujuan khusus dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yaitu diperolehnya satu sumber data yang dapat dipakai, data dimanfaatkan dengan benar serta akurat. Diharapkan dengan adanya Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG) bisa membantu pegawai untuk lebih mengenal sektor data pegawai yang terdapat di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. dari informasi- informasi yang disediakan dan dapat melakukan pengecekan terhadap data pegawai dengan efektif dan mudah.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat merupakan suatu instansi dimana pemerintahnya memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyediaan sarana teknologi informasi yang dijumpai di lembaga pemerintahan. Disamping itu ada di lembaga pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat di aplikasikan melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi. Sistem informasi yang ada di Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) tentang penyajian informasi data dan nama Pegawai. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada penggunaan teknologi komputer dan Sistem Informasi telah mendorong instansi pemerintahan menjalankan tugasnya lebih cepat dan efektif sehingga terwujudnya kinerja yang optimal.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kinerja yang optimal dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat ini merupakan salah satu dorongan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan

pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi.

Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan dan mengambil langkah-langkah pelayanan yang akurat dan cepat dalam pembangunaan Sistem informasi perlu diwujudkan. Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang bertujuan untuk mewujudkan penggunaan sistem informasi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam melayani masyarakat. Penggunaan Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG) menginginkan adanya kinerja dan langkah-langkah yang jelas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diharapkan dapat menggali kinerja yang lebih optimal oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Instruksi ini merupakan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan kinerja pegawai yang baik melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian suatu hasil dan tujuan yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila kinerja tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Kinerja dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi kinerja harus mampu berjalan seefektif mungkin. Setiap kriteria kinerja memiliki sasaran berupa jalur khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap tujuan organisasi.

Kinerja aparatur menjadi tanggung jawab dari suatu kegiatan berdasarkan bobot dan skor untuk setiap kriteria yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan *output* instansi dan memberikan perbaikan yang menuju pada peningkatan *output* di masa akan datang.

Keluaran *(output)* sebagai suatu hasil yang dihasilkan langsung dirasakan dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keluaran *(output)* meliputi, pertama kualitas Pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kedua kuantitas pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kuantitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.

Pelayanan yang mempunyai kualitas yang baik yaitu memiliki ciri-ciri seperti tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik tercermin dari pertama transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, kedua akuntabilitas yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketiga kondisional yaitu

pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, keempat partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, kelima kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan dan status sosial, keenam keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan mengenai *output* di atas, maka dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat telah di katakan baik, karena kualitas merupakan suatu kegiatan yang diberikan melalui jasa seseorang kepada orang lain (masyarakat). Kualitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat yaitu berupa pelayanan kepada masyarakat, dengan cara memberikan pelayanan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat mengenai penyajian informasi data kepegawaian yang ada di Dinas Provinsi Jawa Barat.

Kualitas layanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menunjukkan proses penyampaian informasi data peagwai dari sumber kepada penerima melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Oleh karena itu, kualitas layanan akan berhasil dengan baik apabila informasi yang disampaikan dapat di terima dan di mengerti oleh masyarakat. Kualitas layanan merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai proses dimana masyarakat dapat mengetahui kinerja suatu instansi pemerintahan, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan pelayanan yang efektif.

Pada dasarnya, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) memberikan kontribusi besar pada kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mengolah data dan memberikan informasi tentang system informasi kepagwaian atau kepuasaan kepada masyarakat agar menciptakan pelayanan yang efektif, karena tanpa adanya kualitas layanan informasi yang baik mengenai informasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tidak akan berjalan dan masyarakat tidak akan mendapatkan kepuasan atas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dan mengetahui informasi yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Keluaran *(output)* dapat diukur dari segi bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kuantitas merupakan sesuatu yang dapat memenuhi uji kualitas dalam artian bahwa kuantitas dapat dikatakan sebagai suatu syarat untuk memenuhi uji kualitas sendiri, dimana dari kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat memberikan kemudahan kepada pegawai dalam memperoleh informasi kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat dikatakan masih belum optimal, karena kuantitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mengolah data sampai pengeluaran berupa informasi mengenai system informasi masih kurang cepat dan akurat.

Peningkatan keluaran *(output)* melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dapat memudahkan organisasi (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun bagi masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai informasi perhubungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Meskipun kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat belum optimal, namun dengan memberdayakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi

Selanjutnya terkait dengan keluaran *(output)* yang diukur dari segi kuantitas dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sendiri, dimana jika kualitas dari pelayanan yang diberikan baik maka kuantitas yang dihasilkan juga akan baik, adapun sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik maka kuantitasnya juga tidak akan baik. Seperti yang telah dijelaskan diatas kualitas pelayanan yang diberikan oleh DinasPerhubungan Provinsi Jawa barat kepada masyarakat dapat dikatakan masih belum optimal, karena kuantitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam mengolah data sampai pengeluaran berupa informasi mengenai Sistem informasi yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat masih kurang cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dapat lebih mengoptimalkan kuantitasnya sesuai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada pegawai. Dalam penyajian sistem informasi kepegawaian kepada pegawia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelayanan kepada pegawai yang telah diberikan sudah cukup maksimal dalam pelaksanaannya saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu proses yang dilakukan agar kualitas serta kuantitas dalam pelayanan semakin meningkat dan lebih baik dari tahun sebelumnya, karena pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan SDM

yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Organisasi harus berkembang, untuk itu kemampuan dari Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan organisasi.

Keluaran *(output)* yang berasal langsung dari kualitas dan kuantitas suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik, dari kegiatan yang berupa fisik yaitu penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk mendukung Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) seperti seperangkat komputer beserta sarana pendukung lainnya. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sangat mendukung karena setiap komputer yang ada di Dinas Kebudayaan terhubung ke internet sehingga dalam penerimaan dan pengiriman data dilakukan secara baik.

keluaran *(output)* dari kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah cukup maksimal kepada masyarakat dalam hal penyajian informasi dikota bandung dengan menggunakan Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG).

4.2 Hasil Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam penyajian Sistem Informasi Kepegawaian untuk menjadikannya sebagai suatu cara dalam menciptakan hasil kerja yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diharapkan dapat mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil yang baik.

Hasil yang baik dapat diukur, jika hasil tersebut dapat bermanfaat dan disajikan secara komparatif dengan hasil sebelumnya yang menyangkut target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Ukuran itu mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil, ukuran keluaran, efek sekunder, yang terjadi akibat pemberian pelayanan.

Ukuran persepsi publik tentang hasil Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Usaha meningkatkan hasil kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus dimulai dengan memusatkan perhatian kepada sekelompok masalah yang berkaitan, termasuk teknologi, struktur organisasi, budaya organisasi, perubahan sifat pekerjaan dan pekerja, kebutuhan akan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Proses peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat memberi kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang. Untuk meningkatkan hasil, kinerja yang berarti harus berusaha mencapai tingkat terbaik.

Ukuran keluaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari tujuan dan sasaran serta perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), usaha dan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir kurun waktu (periode) yang ditetapkan atau tertentu, tibalah saatnya untuk melakukan penilaian yaitu membandingkan antara hasil kerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan atau sasaran yang di inginkan. Sasaran-sasaran tersebut diteliti dan mana sasaran yang telah dicapai sepenuhnya atau mana yang telah memenuhi target dan mana yang belum memenuhi target atau belum sepenuhnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, harus memiliki motivasi yang baik dalam kinerja. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pentingnya motivasi bagi organisasi, karena terdapat beberapa hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku organisasi supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Bentuk motivasi kepada organisasi tidak bisa disamaratakan, karena tergantung kondisi sosial dan pendidikannya.

Penerapan motivasi yang dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama motivasi langsung motivasi yang diberikan baik materil (uang) maupun nonmateril (penghargaan) secara langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya kepuasaan.Pemberian motivasi ini biasanya dalam bentuk ucapan pujian, penghargaan, dan bonus berupa uang, Kedua motivasi tidak langsung merupakan pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang semangat kerja atau kelancaran tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara baik (*good-governance*) dan bersih (*clean-government*) juga termasuk didalamnya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, membutuhkan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi yang berbasis pengetahuan dapat dicirikan oleh penggunaan informasi yang itensif serta pengetahuan sebagai sumber untuk menarik masayarakat dan teknologi informasi sebagai instrument mengelola organisasi. Setiap organisasi membutuhkan pengelola, dan pengelola haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terdapat didalamnya dalam menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk meningkatkan kinerja dan unsur-unsur sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kecerdasan dan bakat yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat.

Kemampuan dalam menjalankan kinerja yang baik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat merupakan faktor dan modal utama dalam menunjang kinerja dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).Struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui tata hubungan kerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. untuk menjalankan suatu hasil dari adanya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya sikap dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Norma merupakan aturan-aturan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,dengan adannya norma dapat membatasi sikap Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat agar tidak bertindak sewenang-wenang. Norma atau aturan tersebut jelas akan mempengaruhi sikap DInas perhubungan provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya, norma diperlukan agar dalam bertugas mereka tetap memperhatikan dan memperdulikan norma yang ada.

Ukuran keluaran hasil kerja yang telah di capai oleh Dinas perhubungan provisi Jawa Barat saat ini telah terlaksana dengan baik yaitu dengan di bangunnya sarana dan prasarana yang baik di Dinas perhbungan provinsi jawa Barat seperti di bangunnya Sistem Informasi Kepegwaian (SIMPEG) yaitu tentang penyajian informasi kepegawaian yang ada di Dinas tersebut, target yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat yaitu pelayanan informasi kepegawaian yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perilaku di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat khususnya di bidang program, dapat memberikan arahan yang positif bagi Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat sudah termasuk memiliki kecepatan dalam mengolah data secara maksimal, hal ini tidak terlepas dari pelatihan dan pendidikan di Dinas Perhubungan provinsi jawa barat.

Efek sekunder merupakan akibat atau pengaruh yang kedua dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan oleh Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat dalam penyajian Informasi kepegawaian melalui Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG). Keberhasilan dilaksanakannya Sistem

Infromasi Kepegawaian sangat dipengaruhi oleh mutu kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penyajian informasi kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) perlu mendapat perhatian. Pelatihan dapat juga dilakukan secara khusus untuk mengubah kepuasan dan motivasi kerja bilamana dibutuhkan. Pentingnya pelatihan dan pengembangan menghendaki kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah tertentu, yaitu analisis kebutuhan (kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan tenaga ahli), penentuan tujuan dan materi latihan, pemilihan metode latihan yang tepat dan evaluasi pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya Dinas Perhubungan provinsi jawa Barat supaya lebih profesional. Pengembangan sumber daya Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat dilakukan melalui pelatihan yang diberikan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat supaya bisa meningkatkan kinerja organisasi sehingga profesional kerja dapat terwujud. Karena dengan adanya pelatihan di Dinas Perhubungan Provinsi jawa barat tersebut bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, artinya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinyaa. Pelayanan kepada pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan usaha dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan kemudahan bagi Dinas Perhubungan Provinsi jawa barat itu sendiri dan masyarakat untuk memperoleh informasi kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi jawa barat,

menginginkan semua kebutuhan informasi dapat disampaikan kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas perhubungan provinsi Jawa Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan maka dibutuhkan Sumber Daya manusia pengelola data yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, sarana atau prasarana yang komplit.

Selain melakukan pelayanan yang cepat dan akurat perlu ditingkatkan kualitas Dinas Perhubngan Provinsi Jawa Barat, agar tercipta pelayanan yang efektif. Selain itu juga prosedur atau cara kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kualitas layanan merupakan salah satu penentu keberhasilan kinerja organisasi dalam penyajian Sistem informasi Kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. pelatihan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat akan bertujuan agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya.

Pengembangan sumber daya yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus diterapkan, supaya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sangat membutuhkan tenaga ahli dalam bidang penggunaan perhubungan untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data mengenai informasi pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat yang tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG).

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pelayanan yang di berikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bisa di katakan baik tetapi masih perlu ditingkatkan agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi serta efektif. Selain itu juga prosedur atau cara kerja Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat dalam penyajian Sisitem informasi. Pengembangan serta pelatihan kerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil adalah segala sesuatu yang telah di raih oleh seseorang atau organisasi yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat tertentu bagi orang lain. Hasil kerja merupakan salah satu bentuk yang dapat memberikan keuntungan kepada orang banyak, dari hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat tersendiri. Pencapaian atau hasil yang baik adalah suatu hal yang selalu di inginkan dan di harapakan oleh setiap orang atau bahkan oleh setiap organisasi.

Salah satu contohnya yaitu pada kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penyajian Sistem Informasi Kepegawaian dalam meningkatkan pelayanan kepada pegawai, untuk mendapatkan hasil kerja yang baik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan kepada pegawai melalui Sistem Informasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Hasil adalah berupa keluaran (*output*) yang dihasilkan dari pengolahan data-data yang ada pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam penyajian Sistem Informasi Kepegawaian kepada pegawai yang ada di Dinas Perhubungan provinsi jawa barat. Tujuan atau

sasaran organisasi yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat berupa bagaimana bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi.

Tujuan atau sasaran yang dimaksud adalah pertama untuk mendorong bagaiman pengetahuan tentang system informasi kepegawaian yang ada di Dinas Perhubngan Provinsi jawa barat. Bagaimana tingkat pengetahuan di Dinas Perhubngan Provinsi Jawa Barat dalam mengelola Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG). Kedua menjadikan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian denga baik. Ketiga meningkatnya akses dan mutu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam penyajian Sistem Informasi kepegawaian di Dinas Perhubngan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bahwa hasil kerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah baik yaitu dapat dilihat dari kepuasan pegawai atas pengetahuan Sistem Informasi kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, karena hal ini dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan, sehingga akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien.

4.3 Kaitan Usaha dengan Pencapaian dalam menjalankan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian

Kaitan usaha dengan pencapain Organisasi yaitu terkait dengan efisiensi dan biaya serta merupakan suatu kesatuan unit kerja yang didalamnya diwajibkan terjalinnya interaksi. Tanpa adanya interaksi mustahil akan adanya transformasi informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Organisasi publik dikatakan efektif dan efesien apabila dalam realita pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*client*), artinya tidak ada hambatan yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial yang sangat cepat dari faktor eksternal. Sudah seharusnya setiap instansi pemerintah atau organisasi baik yang bergerak di bidang jasa pelayanan untuk lebih mengoptimalkan pelayanannya kepada publik. Hal ini seperti tercantum dalam visi dan misi serta tujuan dari instansi tersebut. Instansi pemerintah saat ini kurang mampu bersaing dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan jasa dikarenakan tidak dimilikinya konsistensi dan produktivitas kerja yang handal dari instansi pemerintahan.

Banyak alasan yang digunakan oleh pihak instansi pemerintah dalam menutup kelemahan tersebut, seperti kurangnya insfrastruktur, modal, maupun sumber daya manusia yang handal. Padahal jika dicermati dari pihak swasta semua hal tersebut hampir sebanding dan sama rata. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk mampu bersaing dengan pihak swasta, tidak ada salahnya apabila pihak instansi mau belajar dan bekerja dari pihak swasta khususnya dalam bidang

pelayanan kepada publik, karena kedua belah pihak sama-sama ingin memberikan konstribusi yang efektif dan efesien kepada masyarakat yang memerlukan jasa.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyimpanan data mengenai Sistem Informasi kepegawaian terjadi karena tidak tepat waktu, penumpukan data dan tidak akurat. Selain itu di pengaruhi faktor kelalaian pegawai, Keberadaan pegawai ini posisinya sangat mutlak dalam suatu kegiatan organisasi, maka salah satu hal yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dari sumber daya manusia yaitu para aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat agar semakin mempunyai kemampuan teknis dan manajerial untuk melayani kepentingan dan kebutuhan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada di Dinas perhubungan Provinsi Jawa barat.

Upaya peningkatan potensi dan kapabilitas SDM yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat melalui jenjang pendidikan dan berbagai program pembangunan yang multi dimensi harus dapat berjalan dengan baik. karena mutu SDM yang berpendidikan relatif tinggi tentunya wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan pun akan mampu mengimbangi tuntutan dan perubahan yang kompleks dan bergerak cepat. Peningkatan kompetensi SDM aparatur di Dinas Perhubungan Provinsi jawa barat dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Kualitas dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang nyata untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas

secara profesional. Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau aparatur untuk mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*) untuk menciptakan SDM atau aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu,diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur,dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa kendala yang sering terjadi yaitu dalam proses penyimpanan data mengenai sistem informasi kepegawaian yang ada dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat karena faktor SDM, karena manusia adalah motor penggerak segala sesuatu kegiatan, untuk mendapatkan SDM yang efektif dan efisien diperlukan kemampuan aparatur yang memiliki kemampuan dibidangnya dan teknologi informasi terus berkembang sesuai dengan zaman. Sehingga ada kemungkinan perubahan basis pengembangan di masa depan, disertai dengan alasan teknis yang kuat dan mengarah kepada hasil akhir yang lebih baik.

Kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila kinerja tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Kinerja dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi kinerja harus mampu berjalan seefektif mungkin.

Efesiensi merupakan faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat. salah satu untuk mengukur efesiensi dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang di terapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah dengan menilai dari pemusatan dan manfaat yang di rasakan oleh pegawai dalam memberikan sistem informasi kepegawaian di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi keberhasilan dalam hal kinerja. sebuah organisasi, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, khususnya di bidang program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan dana atau modal yang tersedia. Pembelian alat-alat komputer, jaringan komunikasi ataupun sarana prasana yang memadai membutuhkan modal yang cukup agar implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumber daya finansial atau biaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan barang-barang pendukung

lainnya. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam memberdayakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIGMPEG), karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan modal atau dana.

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam kinerja organisasi karena tanpa adanya modal maka kinerja organisasi tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan untuk membangun Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diperlukan peralatan komputer dan jaringan komunikasi yang luas seperti jaringan *internet* dan intranet. Selain itu perlu adanya perbaikan infrastruktur-infrasturktur yang dapat menunjang keberhasilan kinerja organisasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga memerlukan modal yang mencukupi.

Sumber daya anggaran atau modal sangat diperlukan untuk keberhasilan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), karena semua program memerlukan modal yang sangat banyak. Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sudah maksimal hal tersebut dikarenakan adanya modal atau dana sehingga pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sudah berjalan lancar sesuai dengan target yang talah ditentukan sebelumnya, karena modal yang tersedia setengahnya dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pengeluaran Belanja Nasional (APBN), sehingga menjadikan kebijakan yang telah dijalankan mengalami kemajuan.

Menurut aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat modal yang ada saat ini sudah mencukupi karena biaya yang di sediakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah dirasakan cukup untuk membiayai kebutuhan Dinas

Kebudayaan Perhubungan Provinsi Jawa barat seperti untuk pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung keberhasilan Sistem Informasi Kepegawaian, sarana dan prasarana itu seperti pengadaan komputer, pengadaan jaringan komunikasi secara *online*. Modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). sehingga dalam pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran.

4.4 Informasi Penjelas yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian

Baik-buruknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik-buruknya mesin birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, birokrasi pemerintah sangat bergantung pada sumber daya manusia aparaturnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *Good Governance* bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (*corporate governance*) dan masyarakat *(civil society).* Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Para pelaku birokrasi sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, yang mempunyai sikap dan perilaku yang

penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pelayan publik yang baik. Untuk mendukung tujuan ini diperlukan suatu sistem pendayagunaan sumber daya manusia yang baik dan tepat sebagai suatu proses berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi penjelas dari kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) tidak lepas dari faktor substansial dan faktor yang dapat di kontrol dinas itu sendiri, dan pada dasarnya bertujuan untuk mengelola data menjadi informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga kemampuan Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat lebih ditingkatkan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna yang pada akhirnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Faktor Subtansial merupakan faktor yang ada diluar kontrol Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat seperti karateristik lingkungan, Dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) perlu disusun secara baik dan benar agar dapat memenuhi harapan tersebut. Secara umum, pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) mencakup semua proses dalam mengolah data dan menganalisa menjadi informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua proses tersebut harus dapat disusun sistemnya secara baik sehingga dapat menghasilkan *output* yang baik pula. Dari semua proses tersebut, ada tiga unsur yang secara signifikan sangat berpengaruh yaitu rekruitmen, pola karir dan pengukuran beban kerja.

Berdasarkan uraian diatas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan sistem informasi yang terdapat di setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bidang program dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Karena sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai penggerak yang nantinya akan mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bidang program.

Faktor yang dapat di kontrol mengandung makna adanya perubahan dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak memiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari tidak mampu untuk bertanggung jawab menjadi memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Pemberdayaan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ada memiliki sebuah arti memberikan kesempatan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat untuk melakukan suatu aktivitas dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Sebagai suatu sistem, pendayagunaan merupakan rangkaian aspek yang saling berhubungan dan saling terkait satu sama dengan lain dan menjadi satu kesatuan, sehingga pelaksanaan pendayagunaan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dapat berjalan secara optimal.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu sistem yang cukup efektif untuk mengolah data mengenai pegawai, sistem informasi ini merupakan sarana pelayanan kepada pegawai seperti penyajian system informasi kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat.

Tingkat kemampuan staf dalam penyajian data pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, malaui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) setidaknya mempunyai pengetahuan dalam bidang komputer dan mengetahui tentang proses pengelolaan data mengenai Sistem Informasi kepegawaian dengan. Staf yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penyajian Sistem Informasi Kepegawian di Dinas Perhubungan provinsi jawa Barat merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan penyajian Sistem Informasi kepegawai dalam hal ini staf yang memiliki potensi yang handal. Potensi staf yang handal pada penyajian Sistem Informasi kepegawian (SIMPEG) di Dinas Perhubungan provinsi jawa Barat dapat dilihat dari kriteria seperti faham dalam bidang komputer seperti pengoperasian dalam Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG).

Staf yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat khususnya pada bidang Siitem Informasi kepegawian, sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan ditambah dengan pelatihan mengenai proses pengelolaan data yang nantinya akan menunjang dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawian (SIMPEG). Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, hal tersebut dilaksanakan karena dalam penyajian system Informasi Kepegawaian di DInas Perhubungan provinsi Jawa barat dibutuhkan staf yang ahli dan kompeten dalam menjalankan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) demi menciptakan pelayanan kepada masyarakat.

Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan faktor yang bisa menentukan keberhasilan dalam memberdayakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Penyampaian informasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) itu sendiri dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat bentuk penyampaiannya melalui

penjelasannya adalah bahwa Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ini adalah Aplikasi yang akan memudahkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang bagaimana tatacara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Hal tersebut berarti kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan, berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya, keterbukaan Danas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam memberikan pelayanan.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah dimengerti oleh tiap Kepala Bagian, Sehingga dalam proses kinerja dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah dapat melihat data mengenai Sistem Informasi Kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat. Informasi yang jelas dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sangat bermanfaat bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dibutuhkan kejelasan informasi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan kinerja maupun yang berbentuk laporan *Hard Copy*.

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat saat ini telah mengalami peningkatan kearah yang lebih baik lagi dari

tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) kepadapegawai dapat lebih efektif dan efisien, hal ini berarti bahwa keluaran atau *output* dari Kinerja Dinas Perhubungan Provisin Jawa Barat telah di lakukan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kualitas dan kuantitas pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap hasil kerja yang telah di lakukan oleh Kinerja Perhubungan Provinsi Jawa Barat, hasil kerja dikatakan baik jika kualitas dan kuantitas yang di berikan baik pula.